



**SERAH TERIMA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH *UNAUDITED*
TAHUN ANGGARAN 2021
PADA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

Banjarbaru, Selasa (15 Maret 2022) – Bertempat di Ruang Rapat Lt. 1 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Selatan, **M. Ali Asyhar**, menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah *Unaudited* Tahun Anggaran 2021 dari Pemerintah Kota Banjarmasin.

Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah *Unaudited* Tahun Anggaran 2021 ini menjadi dasar untuk BPK melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya akan disampaikan paling lambat 60 hari setelah laporan keuangan diterima sesuai amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004.

Permasalahan-permasalahan yang patut menjadi perhatian diantaranya:

1. Kekurangan Volume atas Pelaksanaan 23 Paket Pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPR Sebesar Rp1.512.482.939,87;
2. Pihak Ketiga Belum Membayar Pajak Restoran atas Pengadaan Makanan dan Minuman;
3. Keterlambatan Pembayaran Pajak Tidak Dikenakan Denda;
4. Perbedaan Data Pajak Aplikasi Pendapatan Smartgov Dengan Pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak; dan
5. BPKPAD Belum Melakukan Monev atas Data Hasil Perekaman Online Transaction Monitoring (OTM) yang Lebih Besar Daripada Pembayaran Pajak Daerah ke Kas Daerah.